



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 21 Februari 2023

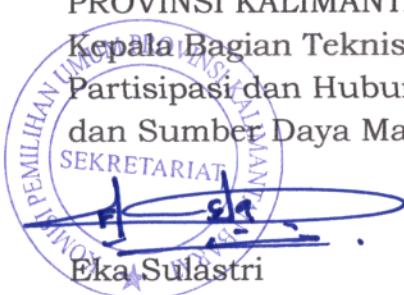
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

RAMDAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	PENGARAH			
1	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusuna kegiatan Reformasi Birokrasi; - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
2	Lomon, S.Sos.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan;
3	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4	Mujiyo, S.Pd.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5	Zainab., S.P., M.P.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
II	PELAKSANA			
1	Basir, S.Pi., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN/BUDAYA KERJA APARATUR			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum
2	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

3	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	Provinsi Kalimantan Barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
4	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota	
5	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
6	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	
7	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota	
8	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
9	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
10	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
11	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
12	Zulfikar, SE.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota	
13	Yulianingsih, SE.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	

B TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	Iswatul Hasanah, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
6	Tropi Yani, S.Ak.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota	

C	TIM KELEMBAGAAN/PENGUATAN ORGANISASI			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan sasaran reformasi birokrasi;</li> </ul>
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
4	R. Seno Suharyo, SH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
5	Irma Dewi Jatmianingsih, SE.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
6	Rika Kastiani, S.T.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
D	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>;</li> </ul>
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
4	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	
5	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
6	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
7	R. Seno Suharyo, SH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
8	Ashari, S.IP.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
9	Nanang Prayoga, S.H.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	

10	Asep Maulana, S.Sos.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota	
E	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR			
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Melaksanakan sistem dan proses pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik;</li> </ul>
2	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Tarsinah, SH.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
5	Gabe Ferdinal Hutagalung, SH.	Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
F	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting;</li> </ul>
2	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota	
4	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
6	Iswatul Hasanah, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
G	TIM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Membangun sistem yang mampu

2	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	<p>mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat;</li> </ul>
3	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota	
4	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
5	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
6	Irma Dewi Jatmianingsih, SE.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
7	Regina Angela Dian Novianti, SE.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
8	Elisa Dina Prayekti, SE.	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Anggota	
9	Rika Kastiani, SE.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
10	Ria Fitriani, A.Md.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	
11	Risa Audina, A.Md.	Pengadmindistrasi Umum	Anggota	
12	Rianisa Kirana, A.Md.	Pengadmindistrasi Umum	Anggota	
H	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</li> </ul>
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
4	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
5	Fachziar, S.Kom.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
6	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, ST.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
7	Nanang Prayoga, S.H.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	

8	Regina Angela Dian Novianti, SE.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
9	Asep Maulana, S.Sos.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota	
III	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Agen Perubahan pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat; serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
3	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan reformasi
4	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Agen Perubahan pada Fungsional Penata Kelola Pemilu	
5	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan	
6	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Agen Perubahan pada Sub Bagian Data dan Informasi	
7	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan	

8	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Agen Perubahan pada Sub Bagian Umum dan Logistik	
9	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	
10	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan SDM	
11	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Agen Perubahan pada Fungsional Penata Kelola Pemilu	
12	Zulfikar, SE.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Agen Perubahan pada Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
13	Yulianingsih, SE.	Arsiparis Ahli Muda	Agen Perubahan pada Fungsional Arsiparis	

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 21 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

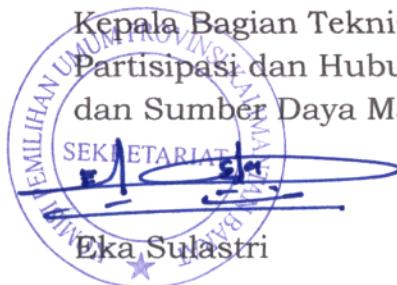
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,

RAMDAN



Eka Sulastri